

**ETIKA BERPOLITIK DALAM PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID
(GUSDUR) DENGAN RELEVANSI PERKEMBANGAN KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1**

OLEH :

RIDHO FIRDAUS

NPM.1321020051

Jurusan : Hukum Tata Negara



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2020 M/1441 H**

**ETIKA BERPOLITIK DALAM PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID
(GUS DUR) DENGAN RELEVANSI PERKEMBANGAN KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjanah S.1

Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG

2020 M/ 1441 H

ABSTRAK

Berbicara persoalan etika politik pada hakikatnya membahas persoalan hukum dan kekuasaan. Hukum terdiri dari Norma-norma perilaku Betul dan Salah dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi hukum hanya bersifat normatif dan tidak afektif. Artinya, hukum sendiri tidak dapat menjamin agar setiap orang taat kepada norma-normanya. Dalam hal politik Abdurrahman Wahid memiliki pandangan dan pemikiran yang memiliki nuansa yang khas dan spesifik, Gus Dur yang sangat kental dengan ilmu pesantren namun mampu memasuki pemikiran modern, menurutnya pandangan paling mendasar dari politik yakni kesejahteraan manusia. Dari Sumber-sumber Keislaman, Gus Dur tidak memisahkan antara Islam dari Politik Karena kehidupan politik yang padadarnya bersifat Duniawi, tidak bisa lepas dari tuntunan moral yang tinggi. Berpolitik haruslah dengan standar akhlak mulia yang sekarang dikenal dengan Etika.

Rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana etika berpolitik dalam pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Bagaimana Relevansi Etika Berpolitik pemikiran Abdurrahman Wahid dengan perkembangan kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia.

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana etika berpolitik dalam pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta untuk mengetahui bagaimana relevansi etika berpolitik pemikiran Abdurrahman Wahid dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*. dalam penelitian kepustakaan ini, penulis mengumpulkan bahan yang menjadi kajian untuk penelitian ini yaitu bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier, lalu penulis menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Dari hasil analisis penulis menarik kesimpulan bahwasannya etika berpolitik gusdur sangat sesuai dengan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara yang majemuk, dengan suku, ras, agama, dan budaya di dalamnya. Gus Dur dengan etika politik yang berdasar pada nilai kemanusiaan, humanisme, dan pluralisme menerapkan prinsip-prinsip Islam yang mendasar seperti: kesetaraan (*al-musāwah*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), keadilan (*al-adālah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), kebebasan memeluk agama (*al-hurriyah*), kemudian *Mashlahah al-mursalah* yakni prinsip nilai kemaslahatan. Implikasi dari etika berpolitik gusdur adalah memberikan nuansa politik yang adil dan damai tanpa ada nya disintegrasi ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dengan metode dialog untuk mencari titik temu kemajemukan realitas masyarakat.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Etika Berpolitik Dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid
(Gus Dur) Dengan Relevansi Perkembangan Kehidupan
Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia.
Nama Mahasiswa : Ridho Firdaus
NPM : 1321020051
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosah fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alamsyah, M.Ag.

NIP. 197009011997031002

Yufi Wiyos Rini Masykurah, S.Ag. M.Si.

NIP : 197304142000032002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Frenki, M. Si.

NIP. 19800152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : *Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260*

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan Judul **“ETIKA BERPOLITIK DALAM PEMIKIRAN
ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) DENGAN RELEVANSI
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI
INDONESIA”** disusun oleh **Ridho Firdaus NPM 1321020051** Jurusan Hukum

**Tata Negara, Setelah Diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN
Raden Intan Lampung pada hari/tanggal :**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.I

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I, M.H.I

Penguji Utama : Relit Nur Edi, S.Ag. M.H.I

Penguji I : Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag.

Penguji II : Yufi Wiyos Rini M., S.Ag., M.Si.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196710211993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلَا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹



¹ Departemen Agama AL-Quran dan terjemahan Al-maidah ayat 8. H.113

PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT dan dengan kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta M.Taib dan Rosyana yang telah membesarkan, merawat, membimbing, serta telah banyak berjuang, memberikan motivasi dan mendo'akan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran;
2. Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah UIN Radenintan Lampung yang terus memberikan dukungan dalam mencapai keberhasilanku;
3. Seseorang yang selalu menemani, terus memberikan semangat, dukungan serta arahan;
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ridho Firdaus. Penulis dilahirkan di Pardasuka 24 Februari 1994. Penulis merupakan anak pertama (3) dari empat (7) bersaudara, dari pasangan bapak M. Taib dan ibu Rosyana. Kakak penulis bernama Eva Susila, Agung Stia, Kemudian Adik-adik Bernama Amin Rais, Evi Junita Sari, Ela Suzan Tika, Dan Ema Melani Susanti. Penulis mengawali pendidikannya pada:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri1Banjar Negri, Cukuh Balak, yang telah diselesaikan pada tahun 2007
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Hidayah Pertiwi Cukuh Balak, yang telah diselesaikan pada tahun 2010
3. Sekolah Menengah Atas / Sederajat MAN 2 Bandar Lampung, yang telah diselesaikan pada tahun 2013

Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) jurusan Jinayah Siyash dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Etika Berpolitik Dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Dengan Relevansi Perkembangan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia.”

Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif dalam keorganisasian baik extra maupun intra kampus. Dalam organisasi intra kampus, penulis terdaftar sebagai Mentri Luar Negri Badan Exsekutif Mahasiswa Universitas . Sedangkan dalam organisasi extra kampus penulis aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah-Nya, sehingga penulisan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan hingga zaman kecerdasan/ kemajuan.

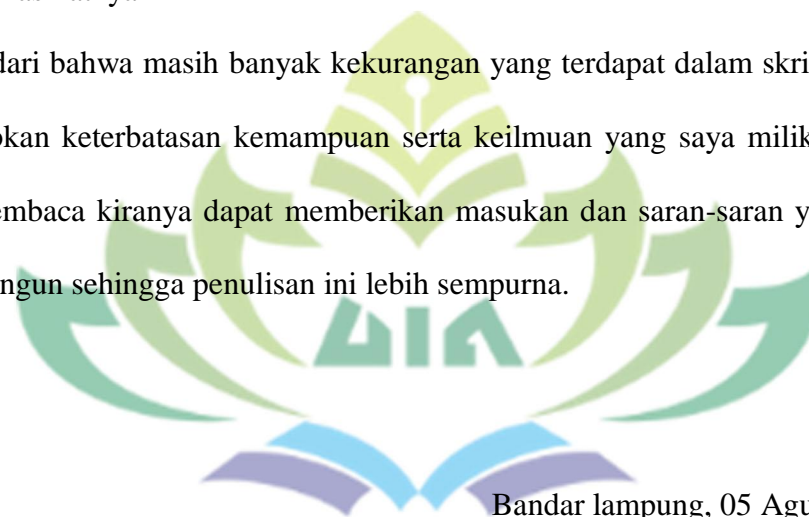
Skripsi ini berjudul “Etika Berpolitik Dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Dengan Relevansi Perkembangan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia.” dapat diselesaikan meskipun penulis sadari masih banyak kekurangan di dalamnya.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Dr. Nurnazli, S.Ag. M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Frengki, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag. Dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah membentangkan pengetahuan, membimbing, serta mengarahkan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah yang telah membantu penyelesaian penulisan baik tenaga fikiran maupun materil demi selesainya penulisan ini
8. Hipzoni, SH. Kris Manik, SH. Lukman Pidada, SH, Dan Meydi M. Putra, SH. yang selalu menemani dalam penulisan serta memberikan nasihat-nasihatnya

menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini yang disebabkan keterbatasan kemampuan serta keilmuan yang saya miliki, untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna.



Bandar lampung, 05 Agustus 2019
Penulis

Ridho Firdaus

DAFTAR ISI

ABSTRAK
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....
PENGESAHAN.....
MOTTO
PERSEMBAHAN.....
RIWAYAT HIDUP
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang	3
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II ETIKA POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA	
A. Pengertian Etika politik	16
B. Teori-teori tentang Etika Politik	35
C. Tantangan kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia.....	39
1. Indonesia berbagai Suku, Ras, Agama dan Budaya	39
2. NKRI dan Nasionalis.....	42
3. Bahaya Disintegrasi Dan Radikalisme	46
BAB III PEMIKIRAN ABDURAHMAN WAHID TENTANG ETIKA BERPOLITIK	
A. Biografi Adurrahman Wahid (Gus Dur)	56
B. Latar Belakang Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur).....	64
C. Pemikiran Gus Dur Tentang Etika Politik.....	67
BAB IV ANALISIS	
A. Pemikiran Gus Dur dalam Perkembangan Politik yang Etis di Indonesia	78
B. Relevansi (kecocokan) Pemikiran Etika Abdurarahman Wahid Dalam Pengembangan Politik Di Indonesia	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah: **Etika Berpolitik Dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Dengan Relevansi Perkembangan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia** Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam menafsirkan judul tersebut di atas maka penulis akan menjelaskan Istilah-istilah yang ada dalam judul tersebut. Adapun beberapa istilah yang ada dalam judul ini antara lain sebagai berikut :

Etika, ialah pemikiran sistematis tentang moralitas atau usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Secara historis etika sebagai usaha filsafat yang lahir dari keamburkan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu.²

Berpolitik, kata dasar dari politik yang memiliki makna selaga urusan atau tindakan tentang kebijakan, siasat, dan sebagainya yang mengenai pemerintahan. Sedangkan berpolitik adalah menjalankan atau menganut paham politik, atau ikut serta dalam urusan politik³

Pemikiran, Ditinjau dari segi terminologi adalah' kegiatan manusia mencermati suatu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan akalnya untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan yang baru atau yang lain⁴

² Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar (Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h15.

³ *Kamus besar bahasa indonesia (KBBI)*

⁴ <http://filsafataddict.definisi-pemikiran.blogspot.com.22/06/2019/jam.21:03>

Dr. K. H. Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999.⁵

Relevansi, yang di maksud dalam judul skripsi ini adalah keterkaitan, hubungan atau kecocokan.⁶

Berbangsa dan Bernegara, merupakan kumpulan manusia yang terikat, karena kesatuan bahasa & wilayah tertentu seperti negara Indonesia. Pengertian bernegara: Organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yg bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya pemerintahan yg mengurus tata tertib seperti pemerintahan indonesia.

Maksud dari judul skripsi ini adalah mengungkap tentang Etika Berpolitik Dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Dengan Relevansi Perkembangan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia sebagaimana kita ketahui bahwa Gus Dur, yang merupakan sosok yang menjadi icon Indonesia berdamai telah mendunia dan terkenal kesegala penjur, beliau tidak berfikir bagaimana layaknya sebagai orang Indonesia namun malah berfikir bagaimana umumnya pemikiran manusia biasa berkembang sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, inilah yang sampai sekarang menjadi pembicaraan orang banyak kaum intelektual. betapa Gus Dur begitu dicintai, berkat pluralisme dan perdamaian yang beliau gagas baik dalam hal pemikiran maupun praktis

⁵ Jakob Oetama dan Yenny Zannuba Wahid (ed), *Damai Bersama Gus dur*, (Jakarta: PT Kompas Nusatara, 2010), h. 44.

⁶ *Kamus besar bahasa indonesia* (KBBI)

berkehidupan sampai beliau menghembuskan nafas terakhir tepatnya pukul 19.45 wib rabu malam kamis tanggal 30 Desember 2009.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan saya memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

a. Alasan Obyektif

Pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan judul skripsi, hal ini dikarenakan peneliti ingin menjelaskan tentang Etika Berpolitik Dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gusdur) Dengan Relevansi Perkembangan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia.

b. Alasan Subyektif

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan jinayah siyasa. Serta tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya.

C. Latar Belakang Masalah

Berbicara persoalan etika politik pada hakikatnya membahas persoalan hukum dan kekuasaan. Hukum adalah aturan normatif masyarakat, hukum yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Hukum terdiri dari norma-norma perilaku betul dan salah dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi hukum hanya bersifat normatif dan tidak

afektif. Artinya, hukum sendiri tidak dapat menjamin agar setiap orang taat kepada norma-normanya. Secara efektif yang dapat menentukan kelakuan masyarakat hanyalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk mamaksakan kehendaknya, lembaga itu adalah Negara.⁷

Asal kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*ethos*” yang berarti watak atau adat. Kata ini identik dengan asal kata moral dari bahasa Latin “*mos*” (jamaknya adalah *mores*) yang juga berarti adat atau cara hidup. Jadi kedua kata tersebut menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan atau praktik sekelompok manusia.⁸

Etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia ingin menjadi baik. Hal itu juga berlaku bagi kaum agama juga memerlukan etika.⁹

Fokus etika adalah menggambarkan dan mengevaluasi alasan yang diberikan oleh orang atau kelompok untuk penilaian yang mereka buat mengenai benar dan salah atau baik dan buruk, khususnya ketika istilah-istilah itu berhubungan dengan tindakan, sikap, dan kepercayaan manusia. Bagi ‘Abduh, intuisi moral mampu menetapkan prinsip pertama moralitas dan implikasi moralitas bagi kehidupan politik dan sosial.¹⁰

Aristoteles pernah mengemukakan, bahwa antara etika dan politik itu terdapat hubungan yang paralel. Hubungan tersebut tersimpul pada tujuan yang

⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet.2, (Jakarta: PT Gramedia, 1988), h. 21.

⁸ Muhammad said Etika masarakat indonesia (jakarta : paramita), 1960, h.2

⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar (Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral)*, h. 17

¹⁰ John L. Esposito, *Ensikopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid 2, (Bandung: Mizan, 2002), h. 24-26.

sama-sama ingin mencapai terbinanya warga negara yang baik, susila, setia kepada Negara dan sebagainya. Semua hal itu merupakan kewajiban moral dari setiap warga Negara, sebagai modal pokok untuk membentuk suatu kehidupan Bernegara, Berpolitik yang baik, dalam arti makmur, tenteram, dan sejahtera.¹¹

Etika politik, memang tidak dapat menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara, etika politik tidak berada ditingkat sistem legitimasi politik tertentu dan tidak dapat menyaingi suatu Ideologi Negara. Tetapi etika politik dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan Ideologi Negara kedalam realitas politik yang nyata, misalnya dengan merefleksikan apa inti keadilan sosial, apa dasar etis kerakyatan, bagaimana kekuasaan harus ditangani dan sebagainya.¹²

Menurut Yahya A. Muhaimin, kehidupan Demokratis paling tidak memerlukan sikap dan tindakan saling menghormati dan memerlukan penerapan etika politik, termasuk disini ialah Nilai-nilai Budaya yang tertanam pada warga masyarakat. Aturan dan Norma-norma ini berada pada posisi sentral untuk bisa menyelesaikan pertentangan dan konflik kepentingan antar warga negara.¹³

Islam tidak pernah lepas dari politik, bahkan kehadiran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan

¹¹ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial (Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 111.

¹² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, h. 7

¹³ Yahya A. Muhaimin, *Etika Pembangunan Politik*, dalam Nourouzzaman Shiddiqi dkk, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), h. 47

berpolitik, dalam hal ini lebih ditekankan pada etika politik. Etika bukan hanya suatu keharusan dalam perilaku politik, namun dalam segala bentuk aktivitas manusia tidak terlepas dari nilai-nilai etika. Terkadang nilai etika tersebut diukur dengan intuisi dan etika tersebut sering diukur dengan Agama.

Islam sebagai Agama yang diturunkan kebumi untuk membimbing umatnya kearah yang benar, sebagaimana tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil berdasarkan etika yang dapat dipertahankan di bumi.¹⁴

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلَا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁵

Disini dapat ditarik pandangan bahwa etika Islam tentang keadilan adalah perintah untuk menjadi manusia yang lurus, bertanggung jawab, dan berlaku ataupun bertindak sesuai dengan kontrak sosial hingga terwujud keharmonisan dan keadilan hidup. Sebab etika keadilan dalam islam menuntut tanggung jawab baik sosial makhluk Allah maupun Allah sendiri.

¹⁴ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Quran*, (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983), h. 54

¹⁵ .Departemen Agama AL-Quran dan terjemahan Al-maidah ayat 8. H.113

Islam dan politik itu pada dasarnya tidak terpisahkan. Islam tidak pernah memisahkan antara kegiatan profan dan sakral, kecuali dalam cara pendekatannya. Artinya liputan Islam kepada segenap persoalan hidup, misalnya politik, sebenarnya terjadi terutama hanya pada level etisnya saja. Islam sedikit sekali memberi ketentuan terperinci mengenai Detail-detail berpolitik, yang dibiarkan berkembang sesuai dengan ijtihad para cendekiawan agar sejalan dengan perkembangan sejarah dan tumbuh sebagai kegiatan intelektual kemanusiaan.¹⁶

Keunikan Islam sebenarnya bukan terletak pada persoalan keterkaitan yang erat antara agama dan politik. Agama-agama lain juga mengenal keterkaitan yang erat dengan politik. Bahkan bisa dikatakan menyatu atau tidak mengenal pemisahan dengan masalah politik. Istilah perpolitikan "theokrasi" sendiri sudah menunjukkan adanya kemungkinan agama mana saja untuk menyatu dengan politik, sehingga kekuasaan yang berlaku dipandang sebagai "kekuasaan (politik) Tuhan".¹⁷

Islam menjadi sumber inspirasi moral dan etika berbangsa yang *notabene* Indonesia sangat lemah sekali. Semakin maju negara, etika moral semakin *tough*, seperti Korea Selatan. Karena produktivitas terdorong dengan *high predictability*.¹⁸ Salah satu persoalan besar dalam kehidupan politik bangsa Indonesia adalah masalah kemerosotan moral, terutama moral pemimpin para elit

¹⁶ Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Mizan, 2006), h. 2724

¹⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 188

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 181

di Negeri. Hal ini ditandai dengan terjadinya berbagai macam bentuk penyelewengan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta tindakan pelanggaran lainnya dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Dan hal ini pada akhirnya melahirkan berbagai macam krisis dalam kehidupan politik bangsa.

Krisis telah menerpa kehidupan bangsa Indonesia sejak tahun 1997 lalu hingga saat ini dan meninggalkan persoalan pelik di berbagai bidang kehidupan. Berbagai persoalan terjadi di bidang Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya ini secara signifikan membawa dampak yang besar bagi keberadaan Bangsa dan Negara hingga saat ini.

Misalnya di Bidang politik turut mengalami kondisi serupa, bahkan menjadi salah satu penyumbang terbesar penyebab keterpurukan dan krisis kepanjangan di negeri ini.

Masalah moralitas, kepemimpinan dan kesantunan dalam berpolitik menjadi menjadi persoalan panjang yang tidak terselesaikan dalam kehidupan politik bangsa. Perilaku para elit politik yang sering kali meninggalkan nilai-nilai moral luhur dalam melakukan aktivitas politiknya, telah mencederai persoalan moral dalam kehidupan politik. Berbagai solusi telah ditawarkan, sebagai upaya penyelesaian persoalan kemerosotan moral di bidang politik, Salah satunya adalah agar bangsa Indonesia kembali pada ajaran agama, sebagai upaya mengatasi persoalan kemerosotan moral, terutama yang terjadi pada elite politik serta pada masyarakat bangsa secara keseluruhan.

Islam sebagai agama terbesar yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, dipastikan mampu memberikan wawasan dan tuntunannya sebagai solusi dari segala persoalan yang menimpa kehidupan Bangsa Indonesia saat ini, Terutama sebagai wawasan dan tuntunan moral dalam kehidupan politik bangsa. Islam sendiri sebenarnya telah menjelaskan dan juga memberikan banyak petunjuk mengenai berbagai persoalan hidup manusia di dunia. Salah satunya adalah masalah hubungan antara agama dengan kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya persoalan politik. Hal inilah yang menjadi salah satu keunikan Islam diantara agama-agama lain.

Salah satu cendekiawan Islam yang produktif dalam merespon persoalan moral politik di Indonesia adalah Abdurrahman wahid (Gus Dur) yang menuangkan pemikirannya secara tertulis dalam bentuk artikel, makalah maupun esai yang dibukukan, pemikirannya tentang Islam dan Negara, islam dan pancasila, Islam dan kemajemukan Bangsa.

Dalam hal politik bagi Kaum Muslimin, Abdul Rahman Wahid tokoh intelektual yang memiliki pandangan dan pemikiran yang memiliki nuansa yang khas dan spesifik, Gus Dur yang sangat kental dengan ilmu-ilmu pesantren namun mampu memasuki pemikiran modern, Gus Dur adalah seorang muslim yang mendasarkan kemanfaatan paling mendasar dari politik, yakni kesejahteraan manusia, dari sumber sumber keislaman, dengan demikian secara Esensial Gus Dur tidak memisahkan antara Islam dari Politik meskipun politik itu tidak harus Berbentuk Negara Islam.¹⁹

¹⁹ Ahmad bahar, *biografi kiyai politik abdurahman wahid* ; h, 14

Gus Dur dalam pernyataannya menyampaikan bahwa, tidak ada bentuk baku sebuah Negara dan Proses Pemindehan kekuasaan dalam bentuk yang di tinggalkan Rosullulah Muhammad SAW, baik melalui Ayat-ayat al-quran maupun Hadis membuat perubahan historis atas bangunan Negara yang ada menjadi tidak terelakan atau tercegah lagi. Dengan kata lain kesepakatan akan bentuk Negara tidak dilandaskan pada *dalil-dalil naqli* tetapi pada kebutuhan Masyarakat pada suatu waktu.

Menurut Gus Dur, dalam kehidupan politik kita tidak boleh meninggalkan Nilai-nilai Ketuhanan. Kehidupan Politik yang pada dasarnya bersifat duniawi, tidak bisa lepas dari tuntunan moral yang tinggi. Berpolitik haruslah dengan standar Akhlak mulia, yang sekarang dikenal dengan etika dalam berpolitik.

Dari latar belakang yang penulis jelaskan di atas penulis tertarik untuk membahas tentang **Etika Berpolitik Dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Dengan Relevansi Perkembangan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia**, dan penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah :

1. Apa Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Etika politik ?
2. Bagaimana Relevansi Etika Berpolitik Pemikiran Abdurrahman Wahid dengan perkembangan kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengatahui dan Memahami Bagaimana Etika Berpolitik Dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Relevansi Etika Berpolitik Pemikiran Abdurrahman Wahid Dengan Perkembangan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dari segi teoristis, diharapkan menambah wawasan penulis tentang ilmu etika berpolitik dalam pemikiran abdurrahman wahid (gus dur) dan revansinya terhadap perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Dari segi praktis, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang etika berpolitik dalam pemikiran abdurrahman wahid (gus dur) dan revansinya terhadap perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

G. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan

penelitian ini sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan oleh Fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²⁰

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka penulis perlu menentukan metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis dan objektif, mengenai Fakta-fakta, Sifat-sifat, ciri-ciri diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²²

2. Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier.

a. Data primer

²⁰Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke 7, Bumi Aksara, Jakarta 2004, hlm 24

²¹Rany Kautur, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Taruna Grafika, Bandung, 2000, hlm.33.

²²Kaclan, M.S *Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Paradigma*, Yogyakarta 2005, hlm 28

Data primer adalah data yang bersifat mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.²³ Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Karya-karya literatur Abdul Rahman Wahid Terurama tentang etika politik'
- 3) Al-Qur'an dan Hadist

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah, dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek pembahasan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier antara lain berupa bahan yang bersifat menunjang data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris dan artikel-artikel pada surat kabar serta situs-situs yang terdapat di internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebuah penelitian hukum pada umumnya memiliki beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan Undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*concentual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan filsafat (*philosophical*

²³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 133

approach) dan pendekatan kasus (*case approach*). Yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan analitis.

Pengumpulan data dengan perundang-undangan dilakukan dengan study pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative.²⁴

4. Metode Pengolahan Data

Setelah studi pustaka melalui tahap-tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul tersebut kemudian diolah melalui tahap:

- a. Pemeriksaan (editing). Proses editing merupakan dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data.
- b. Penyusunan (reconstruktung). Setelah melalui beberapa tahapan sebelumnya maka ahir dari pengolahan data in adalah penyusunan data-data yang telah diklarifikasikan dan diberi penandaan. Penyusunan ini dilakukan secara sistematisasi berdasarkan pokok-pok bahasan dan sub pokok bahasan yang di identifikasi dari rumusan masalah.²⁵

²⁴ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 58

²⁵ *Ibid.* Hlm.126

5. Analisa Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang telah dilakukan, maka selanjutnya Data-dapat dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa Kata-kata, tulisan atau lisan dari Orang-orang yang berperilaku atau yang dapat dimengerti.²⁶ Penulis menganalisa data dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Metode berfikir induktif adalah keputusan baru yang bersifat umum yang dapat dari Keputusan-keputusan yang bersifat khusus.²⁷



²⁶ Lexy L Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya* , Bandung, Cet. XIV, 2001, hlm,3

²⁷ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis* Angkasa, Bandung, 2002,hlm 150

BAB II.

KAJIAN PUSTAKA

**ETIKA POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA DI INDONESIA**

A. Pengertian Etika politik

1. Pengertian Etika

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti dalam bentuk tunggal; tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak “*ta etha*” yang artinya adat kebiasaan.²⁸

Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia. Baik atau buruk perbuatan manusia dapat dilihat dari persesuaian dengan adat-istiadat yang umum berlaku di lingkungan dan kesatuan sosial tertentu. Secara etimologis, etika merupakan sistem prinsip-prinsip moral. Berbeda dengan etika, moral lebih tertuju pada prinsip-prinsip tentang benar dan salah, baik dan buruk dan model (*type*). Norma (*norm*) adalah standar, pola (*pattern*), Moral merupakan aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu.²⁹

Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika adalah ilmu bukan sebuah ajaran. Apabila etika menjadi penelitian sistematis maka etika di artikan filsafat moral. Etika menurut filsafat adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang

²⁸ K. Bretens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 4.

²⁹ A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: The English Language Book Society and Oxford University Press, 1974), h. 296

buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.³⁰

Etika bertugas merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar ia berhasil sebagai manusia benar-benar mampu mengemban tugas *khalifah fi al-ardi*. Kata lain dari etika adalah *akhlak*, berasal dari bahasa Arab yaitu *khalaqah* yang berarti menciptakan, dalam bentuk jamak *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku. Akhlak bukan hanya tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan sesama manusia, namun mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Bahasa Indonesia akhlak berarti tata susila atau budi pekerti.³¹

Akhlak, etika, dan moral mengandung kesamaan yaitu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap perbuatan. Namun memiliki perbedaan standar yang mendasar, bagi akhlak standarnya adalah Alquran dan Sunnah, bagi etika standarnya adalah pertimbangan akal pikiran, dan dalam bagi moral standarnya adalah adat kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat.³²

Etika (*ethos*) adalah sebanding dengan moral (*mos*). Kedua-duanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*). Perkataan Jerman Sitte (dari Jerman *kuna, situ*) menunjukkan arti moda (*mode*) tingkah laku manusia, suatu konstansi (*contancy*) tindakan manusia. Secara umum etika atau moral adalah

³⁰ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, (Jakarta: Publicita, 1978), h. 12. Lihat, Suparman Syukur, *Etika Religius*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 1.

³¹ Rahmat Jatnika, *Sistem Etika Islam, Akhlak Mulia*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1985), h. 25.

³² Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 9.

filsafat, ilmu, atau disiplin tentang moda-moda tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia.³³

Menurut Franz Magnis Suseno etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis berkaitan dengan pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah moral. Dalam arti yang lebih luas etika diartikan keseluruhan mengenai norma dan penelitian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.³⁴

Tokoh lain yang mengutarakan tentang pengertian etika adalah Aristoteles. Etika menurutnya adalah ilmu tentang tindakan tepat dalam bidang khas manusia. Objek etika adalah alam yang berubah terutama alam manusia, oleh karena itu etika bukan merupakan *episteme* atau bukan ilmu pengetahuan. Tujuan etika bukanlah disipisifikan kepada pengetahuan, melainkan *praxis*, bukan mengetahui apa itu hidup yang baik, melainkan membuat orang untuk hidup yang lebih baik.³⁵

Frans berpendapat bahwa etika bukanlah suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Karena etika yang merupakan pemikiran secara filsafat itu mempunyai lima ciri khas yaitu bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematis dan normatif. Rasional berarti mendasarkan pada rasio (akal), argumentasi keilmuannya selalu siap untuk dipersoalkan tanpa pengecualian. Kritis berarti bahwa filsafat selalu meragukan sesuatu sehingga

³³ Karl Barth, *Ethic*, suntingan Dietrich Braun dan terjemahan Jerman ke Inggris oleh Geoffrey W. Bromiley, (New York: Seabury Press, 1981), h. 3.

³⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 6.

³⁵ Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX*, (Jakarta: Kanisius, 1998), h. 39.

menimbulkan rasa ingin tahu, sedangkan mendasar berarti bahwa filsafat ingin mengerti sebuah masalah sampai seakarakarnya, tidak puas dengan pengertian dangkal. Sistematis adalah ciri khas pemikiran ilmiah. Pemikiran rasional, kritis dan mendasar, disusun langkah demi langkah secara teratur dan tertata dengan rapi. Normatif berarti tidak sekedar melaporkan pandangan moral, melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang seharusnya.³⁶

Dengan cara pandang dan berfikir di atas, etika disini yang dimaksudkan adalah merupakan filsafat moral, atau suatu pemikiran secara rasional, kritis, mendasar dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral. Etika memberikan pengertian mengapa seseorang mengikuti moralitas tertentu, atau bagaimana seseorang dapat mengambil sikap yang bertanggungjawab berhadapan dengan berbagai moralitas.

Dalam masalah norma-norma moral yang ada dalam masyarakat sangat pluralis, dan mereka yang melakukan serta menganut moralitas tertentu telah mengklaim bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang sudah bermoral, begitu juga dengan orang lain yang hidup dalam suatu masyarakat bahwa perbuatan mereka masing-masing sudah bermoral. Dalam menghadapi realitas semacam itu Franz berpendapat harus ada jalan keluar ataupun alat yaitu etika. Etika di sini digunakan alat untuk mengetahui mengapa seseorang mengikuti ajaran moral

³⁶ Franz Magnis Suseno, Kees Bertens, et-el, *Etika Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 3.

tertentu, atau bagaimana seseorang dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai moralitas.³⁷

Manusia hidup di dunia menjadi makhluk sosial, yang sudah menjadi hukum alam, mereka setiap hari akan berinteraksi dengan orang-orang dari suku, daerah dan agama yang berbeda-beda. Manusia juga akan berhadapan dengan sekian banyak pandangan moral yang saling bertentangan dan semua mengajukan klaim kebenaran mereka masing-masing. Mana yang harus diikuti, yang diperoleh dari orang tua, moralitas tradisional desa, atau moralitas yang ditawarkan melalui media massa. hal ini merupakan sebuah pertanyaan yang akan dijawab ketika manusia tersebut sudah mempelajari etika. Menurut Franz etika tidak menghasilkan secara langsung tentang kebaikan, akan tetapi menghasilkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Etika tidak mempunyai pretensi untuk secara langsung membuat manusia menjadi baik, namun memberikan pengertian tentang berbuat baik. Tujuan dalam mempelajari etika adalah membuat mereka lebih dewasa dan kritis mengenai bidang moral.³⁸

Etika tidak langsung mengajarkan apa yang wajib dilakukan oleh seseorang, melainkan bagaimana pertanyaan itu dapat dijawab secara rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.³⁹ Seorang ahli moral akan lebih bersikap seperti seorang guru ataupun pendeta, mereka akan didatangi oleh para umatnya yang mengalami permasalahan dalam hidupnya. Sedangkan ahli etika mempunyai suatu keahlian teoritis yang dapat dipelajari, tanpa memperdulikan kebutuhan moral orang yang

³⁷ Franz Magnis Suseno, *Berfilsafat dari Konteks* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.9.

³⁸ *Ibid.*, h. 10.

³⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar; (Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral)*, h. 15.

mempelajari etika. Moral bagaikan ban pengaman yang dilempar kekolam untuk menyelamatkan orang yang mau tenggelam, sedangkan etika mengajarkan orang bagaimana ia dapat berenang sendiri. maka ajaran moral langsung formatif bagi manusia, sedangkan pelajaran etika secara langsung hanya menyampaikan kecakapan secara teoritis.

Menurut Franz ada empat alasan mengapa pada zaman sekarang etika sangat diperlukan. *Pertama*, kehidupan dalam masyarakat yang semakin pluralistik, termasuk juga dalam bidang moralitas. Setiap hari manusia saling bertemu, mereka dari suku, daerah dan agama yang berbeda-beda sehingga menimbulkan sekian banyak pandangan moral yang saling bertentangan, karena mereka menganggap bahwa faham mereka yang paling benar. *Kedua*, manusia hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan terjadi di bawah hantaman kekuatan mengenai semua segi kehidupan, yaitu gelombang modernisasi. Gelombang ini telah melanda sampai ke segala penjuru tanah air, sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Rasionalisme, individualisme, kepercayaan akan kemajuan, konsumerisme, sekulerisme, pluralisme religius, serta pendidikan modern secara hakiki mengubah lingkungan budaya dan rohani di Indonesia. *Ketiga*, proses perubahan sosial budaya dan moral telah dipergunakan oleh berbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. Mereka menawarkan ideologi-ideologi sebagai juru penyelamat. Di sini, dengan etika dapat sanggup untuk menghadapi ideologi-ideologi itu dengan kritis dan obyektif dan untuk membentuk penilaian sendiri, agar tidak mudah terpancing, tidak ekstrim, tidak cepat-cepat memeluk segala pandangan baru, tetapi juga tidak menolak nilai-nilai

hanya karena baru dan belum biasa. *Keempat*, etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah.⁴⁰

Tokoh lain yang mengutarakan tentang pengertian etika adalah Aristoteles. Etika menurutnya adalah ilmu tentang tindakan tepat dalam bidang khas manusia. Objek etika adalah alam yang berubah terutama alam manusia, oleh karena itu etika bukan merupakan *episteme* atau bukan ilmu pengetahuan.⁴¹

Tujuan etika bukanlah dispisifikan kepada pengetahuan, melainkan *praxis*, bukan mengetahui apa itu hidup yang baik, melainkan membuat orang untuk hidup yang lebih baik. Etika oleh Hobbs dalam Widodo diartikan “*ethics is concerned with standard of conduct among people in social groups*”. Etika berkaitan dengan standar perilaku di antara orang-orang dalam kelompok sosial. “*ethics is a systematic code of moral principles*”. Etika merupakan prinsip-prinsip nilai moral yang sistematis. Hal ini dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat prinsip moral yang dapat dijadikan sebagai standar, pedoman, referensi, atau acuan bagi orang-orang untuk berperilaku dalam kelompok sosial tertentu. Wignjosoebroto dalam Widodo, mengartikan etika sebagai kekuatan normatif yang bergerak “dari dalam” untuk mengendalikan perilaku seseorang

⁴⁰ *Ibid.* h. 15

⁴¹ Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX*, (Jakarta: Kanisius, 1998), h. 39.

atau sekelompok orang. Etika merupakan refleksi “*self control*” dan bukan “*social control*”.⁴²

2. Pengertian politik

Politik berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “*politikos*” yang artinya kepunyaan negara. Politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem yang disebut negara. Politik juga berasal dari kata “*polis*” yang berarti “negara kota”. Politik berarti adanya hubungan antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan tersebut timbul aturan kewenangan dan kekuasaan bagi pelaku. Oleh karena itu pelaku harus bijaksana dan cerdas dalam menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan politik.⁴³

Pengertian politik secara etimologi, kata “politik” dapat berupa pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (sistem pemerintahan/ dasar pemerintahan). Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap orang lain. Cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah. Secara umum, politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.⁴⁴

Dalam catatan sejarah, orang yang pertama memperkenalkan kata *politik* adalah Aristoteles, seorang filsuf Yunani Kuno. Ia mengemukakan bahwa “manusia merupakan binatang politik, atau *political animal*”. Berangkat dari

⁴² Joko Widodo, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), h. 48.

⁴³ Inu kencana Syafi'i, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 19.

⁴⁴ <http://budisma1.blogspot.com/2011/08/budaya-politik-di-indonesia.html>. Kamis.23.05 2019 jam 11:48

asumsi tersebut, ia mengawali penjelasannya, bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik, karena interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Hal ini merupakan kecenderungan alami dan tidak dapat dihindarkan oleh manusia, dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya daripada bekerja sama dengan orang lain.⁴⁵

Pengertian politik menurut Aristoteles berasal dari kata “*polis* yaitu dari kata *polistaia*; *polis* berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara)” dan *taia* berarti urusan. Jadi, *polis* adalah suatu organisasi kekuasaan yang diberi wewenang untuk mengurus kesatuan masyarakat dengan menciptakan tata tertib dalam kehidupan bersama didalam wilayah Negara.⁴⁶ Dari kata *polis* tersebut dapat diketahui, bahwa “politik” merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, yaitu berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik.⁴⁷

Polis ini mempunyai tujuan untuk memberikan kehidupan yang baik bagi warga negaranya. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan dan perencanaan untuk melakukan kegiatan *polis* tersebut dengan melalui usaha-usaha yang dilakukan dengan mengubah keadaan yang ada sekarang dengan menggunakan suatu “alat kekuasaan” di suatu wilayah negara.⁴⁸

⁴⁵ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 9.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 10.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 12

⁴⁸ *Ibid.*, h. 13

Ramlan Subakti mengatakan ada lima pandangan mengenai politik. *Pertama*, pandangan klasik mengatakan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik secara kelembagaan, artinya politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai kekuasaan artinya segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. *Keempat*, politik sebagai fungsionalisme, yaitu politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik, yaitu kegiatan mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum untuk mendapat dan mempertahankan nilai-nilai.⁴⁹

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa pada umumnya politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.⁵⁰

Menurut Miriam Budiardjo, ada lima pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan istilah “politik” tersebut. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu pendekatan kenegaraan (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy, belied*), dan pembagian kekuasaan (*distribution*) atau alokasi (*allocation*). Politik selalu menyangkut tujuan

⁴⁹ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 2.

⁵⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h.8.

masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Selain itu juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan perorangan.⁵¹

Politik merupakan satu fungsi dari kebudayaan, yang pada gilirannya adalah fungsi dari agama, yang dapat didefinisikan sebagai ide yang paling pinggir dalam orde sosial apapun. Politik memungkinkan individu atau kelompok melakukan beberapa hal yang tanpanya mereka tidak bisa melakukannya, dan politik juga membatasi individu atau kelompok dari melakukan apa yang jika tidak ada politik, mereka akan bisa melakukannya. Politik itu jauh lebih luas dibanding apa yang dilakukan pemerintah.⁵²

Istilah politik dalam perspektif Islam, menurut Pulungan adalah kata politik dalam bahasa Arab disebut *siyasat*, yaitu berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *al-Munjid* dan *Lisan Al-Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasat* bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Secara terminologis dalam *Lisan Al-Arab*, *siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing

⁵¹Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, h. Xiv.

⁵² David Marsh dan Gerry Stoker, *Theory and Methods in Political Science*, (New York: Palgrave macMillan, 2002). Diterjemahkan oleh Helmi Mahadi dan Shohifullah, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 11.

mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.⁵³

Sejak awal hingga perkembangan sekarang ini, terdapat lima pandangan mengenai politik. *Pertama*, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.⁵⁴

Politik tetap merupakan sesuatu yang manusia lakukan, bukannya sesuatu yang mereka miliki atau gunakan atau lihat atau bicarakan atau pikirkan. Mereka yang akan melakukan sesuatu dengannya harus lebih dari sekedar filosofi, dan filosofi yang secara politik mudah dipahami harus mengambil tindakan politik sepenuhnya dari politik sebagai sebuah sikap.⁵⁵

Ibn Khaldun berpendapat bahwa politik itu memegang peranan penting bagi masyarakat. Politik mengajarkan mekanisme dalam mencapai keselarasan dunia dan akhirat. Politik juga dapat mempertahankan manusia dari agresi luar,

⁵³ Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, h. 15-16

⁵⁴ Katimin, *Mozaik Pemikiran Islam Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 258.

⁵⁵ Benjamin Barber, *The Conquest of Politics: Liberal Philosophy in Democratic Times*, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988), h. 11.

subversi, dan infiltrasi. Tanpa kehidupan politik, kehidupan manusia dalam masyarakat tidak akan teratur.⁵⁶

Ibn Khaldun juga mengatakan bahwa politik adalah persoalan kekuasaan. Kedudukan raja adalah suatu kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena memberikan kepada orang yang memegang kedudukan itu segala kekayaan duniawi, serta kepuasan lahir dan batin.⁵⁷

3. Pengertian etika politik

Setelah penjelasan kedua poin di atas, maka tibalah pada intisari penting, yaitu etika politik. Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yakni manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian “moral” senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya.

Tolok ukur yang diperlukan untuk menilai tindakan manusia secara moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ada 3 (tiga) prinsip dasar moral, yaitu prinsip sikap baik, prinsip keadilan dan prinsip hormat terhadap diri sendiri. Prinsip sikap baik sebagai prinsip dasar moral pertama menyangkut

⁵⁶ A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara; Pemikiran Politik Ibn Khaldun*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 93-94.

⁵⁷ Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Mukaddimah*. Terj. Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), h. 186.

sikap dasar manusia yang harus meresapi segala sikap kongkret, tindakan dan kelakuannya. Prinsip sikap baik menuntut suatu pengetahuan tentang realitas supaya dapat diketahui apa yang masing-masing baik bagi yang bersangkutan. Prinsip sikap baik mendasari semua norma moral karena hanya atas dasar prinsip itu masuk akal bagi manusia untuk bersikap adil.⁵⁸

Prinsip moral kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan memberikan atau mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Prinsip keadilan menuntut agar manusia jangan mau mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang baik, dengan melanggar hak seseorang.⁵⁹

Prinsip moral dasar yang ketiga adalah prinsip hormat terhadap diri sendiri. Manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini berdasarkan faham bahwa manusia adalah person, pusat berpengertian, dan berkehendak, yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi. Karena itu manusia tidak boleh dianggap sebagai sarana semata-mata demi suatu tujuan tertentu. Ia adalah tujuan yang bernilai pada dirinya sendiri. Manusia wajib menghormati harkat dan martabatnya sendiri.⁶⁰

⁵⁸ Dwi Siswanto, *Konvergensi Antara Liberalisme dan Kolektivisme Sebagai Dasar Etika Politik Di Indonesia*, h. 268.

⁵⁹ *Ibid.* h. 269.

⁶⁰ *Ibid.* h. 269

Hubungan di antara ketiga prinsip dasar moral itu sebagai berikut: prinsip keadilan dan hormat pada diri sendiri merupakan syarat pelaksanaan sikap baik, sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang bersedia untuk bersikap adil.⁶¹

Dalam kehidupan nyata manusia hendaknya mendasarkan diri pada ketiga prinsip dasar moral ini. Adanya masyarakat, bangsa dan negara tidak lain adalah untuk mewujudkan ketiga prinsip itu untuk menjunjung tinggi harkat kemanusiaan manusia. Etika politik merupakan penjabaran lebih lanjut dari tiga prinsip dasar moral itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶²

Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa, maupun negara bisa berkembang kearah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka seseorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.⁶³

Etika Politik adalah sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara

⁶¹ *Ibid.* h. 270

⁶² *Ibid.* h.271

⁶³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, h. 15.

dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toteran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Etika politik harus menjadi pedoman utama dengan politik santun, cerdas, dan menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongan.

Penerapan etika politik secara bersamaan dapat dilakukan apabila pemahaman tentang kekuasaan tidak sempit. Seperti halnya dengan politik kualitas-tinggi atau bisa disebut *high politic*, dan politik kualitas-rendah atau *low politic*. Politik kualitas-tinggi adalah politik pencapaian kekuasaan yang bercirikan kesadaran para pelakunya bahwa posisi, kedudukan dan jabatan adalah manifestasi dari amanah masyarakat yang membutuhkan petanggungjawaban dan diorientasikan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada. Tujuan etika politik adalah mengarahkan hidup yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan, dan membangun institusi-institusi yang adil. Pemahaman etika politik dapat membantu menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi

menjadi hanya sekadar perilaku individu dalam bernegara. Dengan pencapaian ini, etika politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai yang bertentangan. Ia berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengkondisikan tindakan kolektif.⁶⁴

Etika politik digunakan membatasi, meregulasi, melarang dan memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan mana yang di jauhi. Etika politik yang bersifat umum dan dibangun melalui karakteristik masyarakat bersangkutan amat diperlukan untuk menampung Tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Jadi etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral.⁶⁵

Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Karena kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara

⁶⁴ <http://panah-bambu.blogspot.com/2012/11/etika-politik.html>. Sabtu, 25/05/2017. 07:40 Pm.

⁶⁵ http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2802, dihasilka n 23 mei 2019 pukul 14.23 PM.

tidak identik. Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran-pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. Oleh karena itu tugas etika politik subsider dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.⁶⁶

Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi (bukan negara dan hukum) berupa paham-paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Jadi etika politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk menegajawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya, dengan merefleksikan inti/ hakikat keadilan sosial, bagaimana kekuasaan harus ditangani agar sesuai dengan martabat manusia.⁶⁷

Etika politik sangat terkait dengan hukum dan kekuasaan. Etika politik bersifat metafisis dan dianggap kurang realistis, di sini filosof sering acuh tak acuh. Namun para filosof berjasa mengkritisi dasar-dasar legitimasi kekuasaan politik. Dalam pandangan filosof etika, politisi harus bertindak benar, bertanggung jawab serta argumentatif dalam perilaku politik mereka.⁶⁸ Karena

⁶⁶ Runi Hariantati, *Etika Politik Dalam Negara Demokrasi*, Jurnal Demokrasi, Vol. II No. 1 Th. 2003, h. 61.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 62.

⁶⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, h.2.

bagaimanapun juga, baik dan buruknya kondisi lingkungan sosial, sangat tergantung pada keputusan politik.

Etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Dalam konteks ini pula etika politik berfungsi sebagai sarana kritik ideologi. Lebih jelasnya, sumbangan etika politik terhadap pembangunan masyarakat justru bahwa komitmen satu-satunya adalah pada pencarian kebenaran, entah kognitif, entah normatif, dengan tidak peduli apakah pihak-pihak yang berkuasa menganggapnya tepat atau tidak. Hasil pencarian kebenaran, apalagi kebenaran praktis yang berelevansi luas bagi kehidupan masyarakat, dengan sendirinya pantas untuk selalu disuarakan⁶⁹

Etika itu bersifat refleksif atau meta-real. Menurut Magnis Suseno, etika politik merefleksikan apa yang menjadi inti keadilan, apa yang menjadi dasar etis sebuah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan harus dijalankan. Etika politik tidak antipati pada ideologi dan tidak menjadi cara atau norma tertentu, tetapi membimbing politik yang luhur.⁷⁰

Etika politik tidak berada di tingkat sistem legitimasi politik tertentu dan tidak dapat menyaingi suatu ideologi negara. Tetapi etika politik dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya dengan merefleksikan apa inti keadilan

⁶⁹ *Ibid.*, h. 6.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 12.

sosial, apa dasar etis kerakyatan, dan bagaimana kekuasaan harus ditangani supaya sesuai dengan martabat manusia dan sebagainya.⁷¹

B. Teori-teori tentang Etika Politik

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, maka etika politik berarti suatu standar nilai yang disarikan dari nilai-nilai kemanusiaan untuk dijadikan sebagai kerangka acuan teoritik dalam mempersoalkan dan menjelaskan legitimasi politik serta budaya politik masyarakat.

Menurut Arkoun etika politik adalah pentingnya studi politik yang bernuansa akademis ketimbang mengedepankan studi historis kronologis belaka. Arkoun juga menekankan betapa pentingnya suatu pemerintahan dijalankan dengan memakai logika akademis ketimbang logika politis semata. Ia juga mengkritisi para agamawan yang hanya tampil sebagai legitimator terhadap suatu pemerintahan yang sudah jelas menyimpang dari kebenaran. Arkoun juga mengkritisi kaum fundamentalis yang banyak berlindung di balik slogan kebangkitan Islam. Juga tentang pentingnya landasan pembangunan suatu bangsa yang berdasarkan kekuatan budaya dan intelektualisme, bukan semata-mata beroorientasi pada pembangunan fisik material. Arkoun membedakan antara konsep wewenang dan kekuasaan, di samping itu ia juga mengemukakan ketidaksetujuannya dengan gelar-gelar keislaman yang feodalistik, di mana penguasa

⁷¹ *Ibid.*, h. 7.

banyak yang memanipulasi simbol-simbol agama atau mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan politik mereka.⁷²

Pemikiran Etika Politik al-Mawardi salah satunya adalah tentang hubungan Agama dan Negara. Al-Mawardi berpandangan bahwa dalam pembentukan sebuah negara, manusia harus melakukan kerja sama dengan yang lainnya, karena manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang memiliki tabiat alami untuk bermasyarakat, dan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain.

Dengan adanya keberagaman, pembawaan, perbedaan bakat, kecenderungan alami, serta kemampuan yang menjadikan manusia bersatu dan saling membantu hingga akhirnya sepakat membentuk negara. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam al-Qur'an bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Dengan sifat lemah tersebut Allah menghendaki agar manusia tidak menjadi sombong, arogan, dan tidak berperasaan serta tidak tahu ukuran diri.⁷³

Dalam hal ini, al-Mawardi juga menambahkan bahwa ikatan sosial ini akan benar-benar efektif dalam meredam konflik yang timbul dari dalam sekaligus mampu menimbulkan kesejahteraan bagi warganya apabila dalam ikatan-ikatan tersebut juga terdapat nilai-nilai dasar utama bagi tegaknya stabilitas sosial dan politik sehingga kemakmuran menjadi merata di antara mereka.⁷⁴

Dalam pandangan al-Mawardi, berdirinya negara itu membutuhkan enam nilai utama, yaitu nilai agama, nilai penguasa kharismatik, nilai keadilan

⁷² Muhammad Azhar, *Etika Politik Muhammed Arkoun*, Jurnal Disertasi, vol. 10 no. 1, Juni 2012, h. 7.

⁷³ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyâ...*, 116-119. Lihat: *Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hal. 6

⁷⁴ *Ibid.* hal. 136

menyeluruh, nilai keamanan yang kuat dan menjamin, nilai kesuburan tanah, dan harapan. Generasi masa kita adalah pewaris dari generasi sebelumnya, dan generasi saat inilah yang mengukir sejarah bagi generasi masa setelahnya.⁷⁵ Keenam nilai dasar tersebut merupakan pilar-pilar penyangga utama bagi kehidupan bermasyarakat dan selalu menjadi prinsip - prinsip dasar membangun komunitas sosial. Tanpa itu, komunitas sosial menjadi rentan dalam menghadapi konflik-konflik sosial dan politik yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari ancaman komunitas sosial yang lain. Maka, tampaklah bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu antara keduanya berhubungan secara timbal balik dan saling membutuhkan. Dan ini berarti bahwa agama membutuhkan Negara. Bersama negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara membutuhkan agama karena dengan agama negara bisa mendapatkan bimbingan etika dan moral.⁷⁶

Menurut Aristoteles, Etika adalah pendahulu politik. Politik melingkupi etika. Kebahagiaan bergantung pada sejumlah faktor eksternal (termasuk kesehatan dan beberapa standar hidup minimum) dan pada kebiasaan-kebiasaan internal atau nilai-nilai luhur yang menjaga kita dari pengejaran yang terlalu banyak atau terlalu sedikit terhadap satu kebaikan. Kebahagiaan bukanlah satu keadaan subjektif yang berbeda dari individu ke individu, melainkan sebuah keadaan objektif dari baiknya kondisi seseorang.⁷⁷

⁷⁵Ibid, hal. 137

⁷⁶Ibid, hal. 137-138

⁷⁷ Joseph Losco-Leonard Williams, *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 179.

Aritoteles juga pandangan bahwa kebaikan seseorang sebagai warga Negara dan sebagai manusia hanya bisa terjadi jika Negara itu sendiri baik, apabila negara itu buruk, maka orang baik sebagai warga negara yang buruk itu barangkali jahat sebagai manusia. Sebaliknya dalam negara yang buruk seseorang yang baik sebagai manusia akan betul-betul bertanggung jawab, namun apabila di nilai buruk sebagai warga negara, karena tidak memenuhi aturan yang ditetapkan oleh Negara yang buruk.⁷⁸

Hannah Arendt seorang filsuf yahudi memberikan gagasannya terkait keterlibatan manusia dalam dunia politik. Politik merupakan media diluar diri manusia, keterlibatan diri didalam tindakan politik dilakukan secara sadar untuk merealisasikan berbagai prinsip intrinsik kehidupan politik seperti kebebasan, persamaan Hak, keadilan, solidaritas, keteguhan dan keunggulan yang dimiliki oleh semua orang. Politik juga berupaya untuk memperjuangkan cita-cita bersama berupa keadilan, kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan, namun bukan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan manusia sebagai manusia kerja atau untuk memenuhi kebutuhan individu. Politik dimaksudkan untuk melindungi dunia dari kerusakan dan kehancuran dari dan oleh apapun.⁷⁹

prinsip musyawarah di jelaskan dalam Al-Quran surat As-syura. 42:38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

⁷⁸ Chepry C. hutabarat. Dkk, *Hakikat politik: gusdur dan catatan yang hilang makna*. (lampung: lampung literature, 2019), h. 47.

⁷⁹ *Ibid*, h.47.

Artinya :dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.⁸⁰

Dengan musyawarah potensi-potensi hegemoni pihak-pihak kuat atas pihak yang lemah menjadi tereliminir. Sebab dalam musyawarah dibuka pintu partisipasi aktif seluruh umat dengan posisi dan kedudukan yang sama. Musyawarah itu sendiri dapat diartikan sebagai forum tukar menukar pendapat, ide, gagasan, dan pikiran dalam menyelesaikan sebuah masalah sebelum tiba masa pengambilan sebuah keputusan.

Pentingnya musyawarah dalam islam adalah upaya untuk mencari sebuah pandangan obyektif dalam sebuah perkara, sehingga pengambilan keputusannya dapat dilakukan secara bulat atau dengan resiko yang relative kecil.

Dalam tradisi islam, dikenal juga upaya pengambilan keputusan secara bersama-sama dan berdasarkan suara terbanyak, cara ini disebut dengan Ijma' sebagai bagian dari upaya musyawarah dalam ajaran islam yang dipentingkan adalah adanya jiwa persaudaraan ataupun keputusan yang didasarkan atas pertimbangan nurani dan akal sehatsecara bertanggungjawab terhadap suatu masalah yang menyangkut kemaslahatan bersama dan bukan atas pertimbangan sesaat (kalah-menang). Sifat pengambilan keputusan dalam musyawarah hanya dilakukan untuk hal-hal kebaikan (ma'ruf) dan islam melarang pengambilan keputusan untuk hal-hal yang buruk (mungkar). Sehingga pengambilan suatu keputusan dalam musyawarah didalam ajaran Islam berkaitan dengan prinsip

⁸⁰ Departemen agama, Al-Quran dan Terjemah Asy-syura ayat 38. Hal.487

“amar ma’ruf nahi munkar” (menyuruh pada kebaikan dan melarang pada keburukan).

Ajaran Islam mengandung sosial etika bermasyarakat adalah menegakkan keadilan terhadap sesama manusia. Islam tidak menghendaki bahwa dunia beserta isinya hanya dimiliki oleh orang-orang yang kuat sementara mereka yang lemah tidak mendapatkan apa-apa. Diantara seruan Allah tentang keadilan ini tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah 5:8 yang mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸¹

Dikini dapat ditarik pandangan bahwa etika Islam tentang keadilan adalah perintah untuk menjadi manusia yang lurus, bertanggung jawab, dan berlaku ataupun bertindak sesuai dengan kontrak sosial hingga terwujud keharmonisan dan keadilan hidup. Sebab etika keadilan dalam islam menuntut tanggung jawab baik sosial makhluk Allah maupun Allah sendiri.

C. Tantangan kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia

⁸¹ Departemen agama Al-Quran dan Terjemakh surat Al-maidah ayat 8. Hal.108

1. Indonesia berbagai Suku, Ras, Agama dan Budaya

Indonesia adalah suatu negara multikultural yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, agama dan golongan yang kesemuanya merupakan kekayaan tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Selo Soemardjan mengemukakan bahwa pada waktu disiapkannya Republik Indonesia yang didasarkan atas Pancasila tampaknya para pemimpin kita menyadari realitas bahwa di tanah air kita ada aneka ragam kebudayaan yang masing-masing terwadahkan di dalam suatu suku. Realitas ini tidak dapat diabaikan dan secara rasional harus diakui adanya.⁸²

Founding *Father* bangsa menyadari bahwa keragaman yang dimiliki bangsa merupakan realitas yang harus dijaga eksistensinya dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman merupakan suatu kewajaran sejauh disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Kemajemukan ini tumbuh dan berkembang ratusan tahun lamanya sebagai warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia.

Hefner memaparkan bahwa Pluralisme kultural di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura sangatlah mencolok, terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti itu. Karena itulah dalam teori politik Barat dasawarsa 1930-an dan 1940-an, wilayah ini, khususnya Indonesia dipandang sebagai “*lokus klasik*” bagi konsep masyarakat majemuk/ plural (*plural society*) yang diperkenalkan ke dunia Barat oleh JS Furnivall. Pandangan Hefner yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan

⁸² Alfian. Belajar dari Politik Multikulturalisme. *Kewargaan Multi-kultur: Teori Liberal Mengenal Hal-Hak Minoritas*. (Jakarta:LP3SP 1991).h.173.

“*lokus klasik*” (tempat terbaik/rujukan) bagi konsep masyarakat majemuk bukan sesuatu yang berlebihan. Hal ini terlihat dari keberagaman yang dimiliki Indonesia sebagai bangsa yang unik dimana hanya beberapa wilayah saja di dunia yang dianugrahi keistime- waan ini. Telaah mengenai keberagaman sebuah bangsa kemudian dikenal dengan konsep multikultural. Banyak ahli mengemukakan bahwa konsep multikultural pada dasarnya merupakan konsep harmoni dalam keragaman budaya yang tumbuh seiring dengan kesederajatan di antara budaya yang berbeda. Harmoni ini menuntut setiap individu untuk memiliki penghargaan terhadap kebudayaan individu lain yang hidup dalam komunitasnya. Dalam masyarakat multikultur, setiap individu maupun masyarakat memiliki kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) yang menuntut terciptanya penghargaan tertentu secara sosial. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.⁸³

Menurut Bhiku Parekh mengatakan bahwa Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihanannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan.⁸⁴

Sejalan dengan pandangan tersebut, Musa Asy'arie mengata bahwa “multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya

⁸³Mahfud,C. *Pendidikan Multikultural*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009,) h.83

⁸⁴Azra, A. “*Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme*”. (Bogor: Brighten Press.2006),h.62

sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat”. Kearifan akan tumbuh jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kepastian hidup yang kodrati. Kearifan dapat tumbuh baik dalam kehidupan diri sebagai individu yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompleks. Dengan demikian, muncul suatu kesadaran bahwa keanekaragaman dalam realitas dinamika kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan. “Multikulturalisme adalah landasan budaya yang terkait dengan pencapaian *civility* (keadaban), yang amat esensial bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban, dan keadaban yang demokratis.⁸⁵

Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa “kebudayaan Indonesia merupakan puncak-puncak budaya dari masing-masing suku bangsa. Puncak-puncak kebudayaan dari suatu suku bangsa merupakan unsur-unsur budaya lokal yang dapat memperkuat solidaritas nasional”. Solidaritas nasional terbentuk dari keadaban yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan pencapaian *civility* (keadaban) di masyarakat, maka akan terbentuk suatu kekuatan solidaritas nasional. Pengembangan wawasan multikultural sebagaimana telah dipaparkan di atas mutlak harus dibentuk dan ditanamkan dalam suatu kehidupan masyarakat yang majemuk. Jika hal tersebut tidak ditanamkan dalam suatu masyarakat yang majemuk, maka kemajemukan akan membawa pada perpecahan dan konflik.⁸⁶

⁸⁵ Mahfud, C. *Pendidikan Multikultural*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005,) h.103

⁸⁶ Tilaar, H. A.R. *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta.2007),h.33.

Indonesia sebagai bangsa yang multikultural harus mengembangkan wawasan multikultural tersebut dalam semua tatanan kehidupan yang harmonis. Menurut Djaka Soetapa “kemajemukan itu juga dapat menjadi bencana bagi bangsa Indonesia, karena kemajemukan dapat menjadi sumber dan potensi konflik yang dapat mengganggu dan bahkan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa”.⁸⁷

2. NKRI dan Nasionalisme

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang memiliki fenomena tingkat heterogenitas kependudukan yang sangat tinggi. Keragaman etnis dan budaya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang paling artifisial. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa Indonesia memakai konsep Bentuk Negara kesatuan dimana Pemerintahan yang mengatukkkr jalannya Negara secara Umum adalah pemerintah Pusat. Selanjutnya, bakrulah ada sebuah konsep desentralisasi serta otonomi daerah yang nantinya akan membuat daerah-daerah mengeluarkan potensi yang mereka miliki mkasing-masing.

Hal ini dikarenakan dengan adanya sebuah pemkerintahan yang dikontrol dari pusat maka seharusnya kebijakan yang diberikan pemerintah pusat terhadap daerah sifatnya adalah merata dan adil, tidak ada suatu daerah yang diberi sebuah regulasi dan kebijakan yang bersifat khusus. Jika negara Indonesia menganut sistem federasi, akan ada kesenjangan yang terjadi di tiap-tiap daerah di Indonesia karena prinsip negara federasi adalah pemerintah

⁸⁷ Budimansyah, D. dan Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultura* (bandung: universitas indonesia 1998), h.108.

daerah (atau negara bagian) memiliki kekuasaan dan kedaulatannya sendiri namun tetap sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bayangkan jika tiap daerah di Indonesia memiliki kedaulatan mereka masing-masing dan menimbulkan kesenjangan di antara daerah-daerah tersebut, maka yang berpotensi terjadi adalah sebuah disintegrasi bangsa. Selain itu, Bangsa Indonesia ingin memilih bentuk negaranya sendiri, yang mereka anggap sesuai dengan situasi dan kondisi mereka, bukan sebuah bentuk negara federasi yang merupakan 'mandat dan syarat' dari pemerintahan Belanda pada masa awal kemerdekaan Indonesia.⁸⁸

Mohammad Hatta sebagai salah satu republikan paling berpengaruh memberikan berbagai alasan yang menjelaskan mengapa Indonesia harus memilih bentuk republik sebagai bentuk pemerintahannya. Alasan pertama adalah sudah jelas bahwa republik adalah sebuah bentuk pemerintahan dimana yang memegang kedaulatan adalah rakyat.⁸⁹

Jika berdasarkan kedaulatan rakyat maka yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat, dimana pemerintahan yang berotoritas akan berasal dari rakyat dan bekerja demi kepentingan rakyat dan negaranya saja sehingga berbagai keputusan yang dihasilkan harus melalui jalan mufakat terlebih dahulu. Mufakat yang dimaksud disini adalah pengambilan keputusan secara

⁸⁸ Kahin, George. *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1952), h. 450.k

⁸⁹ Hatta, Mohammad. 2014. "*Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan Otonomi*". (Bantul: Kreasi Wacana 2014),h.6.

kolektif dengan jalan permuyawaratan perwakilan.⁹⁰ Jalan mufakat inilah yang nantinya akan menjadi sebuah jaminan keadilan yang bersifat merata bagi seluruh rakyat Indonesia dimana tidak ada suatu golongan tertentu yang akan lebih mementingkan kepentingan golongannya di atas kepentingan kolektif negara. Alasan kedua adalah dengan adanya kedaulatan rakyat, maka tanggung jawab tertinggi juga ada di pundak rakyat karena dasar pemerintahan yang adil adalah siapa yang berkuasa maka ia yang bertanggung jawab.⁹¹

Pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat pada dasarnya akan lebih tangguh karena dijunjung oleh tanggung jawab kolektif dimana ketika muncul perasaan tanggung jawab bersama, akan muncul pula sebuah sendi kenegaraan yang kokoh. Alasan kedua inilah yang sangat berkaitan dengan alasan tidak dipilihnya bentuk negara monarki atau oligarki. Jika dalam bentuk monarki atau oligarki, yang memiliki kekuasaan adalah raja atau sekelompok kecil masyarakat saja sehingga jalannya suatu negara akan sangat bergantung pada figur dan kecakapan satu orang atau beberapa orang saja. Secara lebih lanjut, Hatta menjelaskan bahwa kecakapan dan figur tersebut tidaklah bersifat kekal jika dibandingkan dengan pemerintahan rakyat yang sifatnya lebih kekal, karena rakyat akan selalu ada selama negara tersebut berdiri.⁹²

Tjokroaminoto memberikan sebuah kalimat yang menyatakan bahwa pemerintahan yang “sempurna” adalah sebuah pemerintahan yang memiliki sebuah perwakilan rakyat yang bekerja secara sungguh-sungguh untuk

⁹⁰ *Ibid*, h. 7.

⁹¹ *Ibid*, h. 8.

⁹² *Ibid*, h. 13.

kepentingan rakyat di sampingnya dimana hal ini menegaskan bahwa pemerintahan berbentuk republik adalah sebuah bentuk pemerintahan yang paling sesuai bagi Bangsa Indonesia.⁹³

Pemilihan bentuk Negara Kesatuan dan Republik itu sendiri dilatarbelakangi oleh situasi sosial dan politik yang terjadi kala itu. Gagalnya sistem pemerintahan federasi yaitu Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 yang membuat rakyat semakin gencar menyerukan adanya bentuk negara kesatuan karena pada awalnya Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditambah dengan situasi dan realitas sosial yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang heterogen dan memiliki keragaman yang sangat kompleks maka bentuk negara kesatuan republik adalah sebuah pilihan yang sekiranya cocok bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk memperkuat argumen para ahli di atas, menarik sebuah kesimpulan sederhana yaitu Indonesia adalah sebuah negara dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi baik dari sisi heterogenitas bangsa maupun kepentingan yang ada di dalamnya, namun dapat bersatu di bawah panji negara kesatuan yang tidak memandang etnis, agama, golongan tertentu serta di bawah bendera republik yang menomorsatukan kepentingan seluruh rakyat (kolektif) di atas kepentingan golongan ataupun kelompok tertentu sehingga dapat tercipta suatu hubungan yang terintegrasi dan harmonis di antara Bangsa Indonesia itu sendiri.

3. Bahaya Disintegrasi Dan Radikalisme

⁹³ Pitut dan drs. A. Zainoel Ihsan. *Tjokroaminoto, O. S., Abdoel Moeis, dan R. Hasan Djajadiningrat. Nasionalisme, Sistem Pemerintahan dan Mandiri*, (Jakarta: Jaya Sakti, 1981).

a). Disintegrasi

Kata disintegrasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu “Disintegration”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi dari kata disintegrasi yaitu keadaan tidak bersatu padu atau keadaan yang terpecah belah atau hilangnya persatuan atau keutuhan. Disintegrasi sendiri sepadan dengan kata perpecahan. maka dari itu dapat disimpulkan arti dari disintegrasi nasional yaitu tidak bersatu padunya suatu bangsa atau perpecahan di antara suatu bangsa.⁹⁴

Indonesia yang memiliki keanekaragaman dan sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) baik dilihat dari berbagai segi, seperti, agama, bahasa, ras dan adat istiadat, dan juga kondisi faktual ini pada sisi lain merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain yang tetap wajib dipelihara.

Keanekaragaman itu juga memiliki potensi konflik yang bila tidak dikelola dengan baik bisa mengganggu persatuan, keutuhan dan kesatuan bangsa, contohnya gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia dari sebab ketidakpuasan serta perbedaan kepentingan yang bisa mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa. Potensi tersebut sangatlah besar hal itu bisa kita lihat dari banyaknya permasalahan yang kompleks yang terjadi dan jika tidak diberi solusi pemahamannya bisa berdampak pada meningkatnya konflik.⁹⁵

⁹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹⁵ Tilaar, H. A.R. *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta.2007),h.33.

Ketika terjadi disintegrasi nasional, bukan tidak mungkin terjadi pelepasan wilayah dari suatu negara. tentu hal ini tidak dapat dibiarkan terjadi di Indonesia. Sudah banyak contoh disintegrasi nasional yang berakibat luar biasa buruknya bagi suatu bangsa. Lihat saja bangsa Semenanjung Korea sana, karena terjadi perbedaan ideologi dan tidak dapat dipersatukan lagi, mereka terpecah menjadi dua negara, yaitu negara Korea Selatan yang menganut paham demokrasi dan negara Korea Utara yang berhaluan komunis.

Disintegrasi nasional dapat terjadi karena berbagai faktor penyebab. Dengan mengetahui penyebab dari disintegrasi nasional tersebut, kita dapat memahami lebih baik bagaimana cara menghindarinya agar tidak terjadi perpecahan sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Adapun salah satu dari penyebab terjadinya disintegrasi nasional adalah:

a. Menurunnya Tingkat Toleransi di Tengah Masyarakat

Dahulu kita diajarkan untuk saling hormat menghormati segala perbedaan, tidak membedakan perlakuan kita terhadap orang lain hanya karena suku, ras, agama, adat, kondisi ekonomi, kondisi fisik, tingkat pendidikan ataupun hal-hal lainnya.⁹⁶ Namun, seiring berlangsungnya era globalisasi, nyatanya tingkat toleransi di tengah masyarakat malah semakin menurun. Perbedaan dijadikan faktor untuk beradu pendapat. Mungkin hal ini sering kita temui di dunia media sosial. Namun, banyak

⁹⁶ Hatta, Mohammad. 2014. "*Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan Otonomi*". (Bantul: Kreasi Wacana 2014),h.6.

juga perpecahan yang disebabkan oleh konflik antar etnis, konflik antar agama, maupun konflik adat.

Sejatinya, sebagai seseorang yang sedari tingkat sekolah dasar telah diajarkan pemahaman mengenai Pancasila berikut contoh-contoh pengamalannya, sudah seharusnya kita senantiasa menjadi seseorang yang menjaga persatuan dan tidak memulai perpecahan. Oleh karena itu, segala bentuk penyebab dari terjadinya disintegrasi nasional yang telah disebutkan di atas sebaiknya kita hindari dan apabila kita mampu, maka perbaiki dan kita ajak orang lain untuk ikut serta mengatasi penyebab perpecahan bangsa. Segala cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia juga harus kita lakukan.

b. Iklim Politik yang Kurang Sehat

Setiap hari kita dapat menemui berita yang kurang mengenakkan dari dunia perpolitikan di Indonesia. Hal ini mengakibatkan rakyat menjadi antipati terhadap politik dan pemerintahan. Kita tidak dapat memungkiri bahwa banyak partai politik yang berkuasa ternyata kurang memperhatikan kepentingan rakyat dan mempermainkan politik untuk kepentingannya sendiri. Akibatnya, banyak terjadi demonstrasi dan perpecahan di tengah masyarakat ketika membahas masalah politik ini.

Di Indonesia sendiri politik kebencian tersebut mengeksploitasi isu politik identitas, sentimen moralitas agama dan nasionalisme sempit oleh aktor negara dan non-negara yang mengajak pengikut mereka dan

masyarakat luas untuk membenci mereka yang dianggap berbeda, sehingga dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk itu, sebagai sesama anak bangsa mari jauhkan politik kebencian, jaga toleransi, kedamaian, kehormatan bangsa, dan senantiasa mengedepankan etika-moral serta nasionalisme demi kelangsungan NKRI. Yang tidak kalah penting adalah revitalisasi lembaga, badan, dan organisasi kemahasiswaan intra maupun ekstra kampus. Organisasi-organisasi yang ada di kampus memegang peranan penting untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme ini melalui pemahaman keagamaan dan kebangsaan yang komprehensif dan kaya makna.

b). Radikalisme

Radikalisme dalam arti bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis dan revolusioner.⁹⁷ Namun Radikalisme, bisa juga berarti, konsep sikap jiwa dalam menegakkan perubahan. Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham radikal tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa. Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering

⁹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Mereka suka melakukan tindakan-tindakan teror, yang berartimenakut-nakuti atau menyebabkan ketakutan.⁹⁸

Sementara Islam merupakan agama kedamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek penggunaan kekerasan untuk menakut-nakuti dalam menyebarkan agama. Radikalisme itu mengandung sikap jiwa yang membawa kepada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan kemapa-nan dan menggantinya dengan gagasan baru. Makna yang terakhir ini, radikalisme adalah sebagai pemahaman negatif dan bahkan bisa menjadi berbahaya sebagai ekstrim kiri atau kanan. Mereka sering mengklaim kebenaran tunggal. Sehingga mereka dengan mudahnya menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat dengannya. Mereka memosisikan diri seolah-olah “Nabi” yang diutus oleh Tuhan untuk meluruskan kembali manusia yang tak sepaham dengannya. Mereka juga cenderung mempersulit agama dengan menganggap ibadah mubah atau sunnah seakan-akan wajib dan hal yang makruh seakan-akan haram.

Sebagai contoh ialah fenomena memanjangkan jenggot dan meninggikan celana di atas mata kaki bagi laki-laki dan bercadar bagi perempuan. Bagi mereka ini adalah hal yang wajib. Jadi mereka lebih cenderung fokus terhadap kulit daripada isi dan me-nafsirkan agama secara sempit. Sering kita jumpai sebagian mereka mengalami overdosis agama atau berlebihan. Misalnya, dalam berdakwah mereka mengesampingkan

⁹⁸ Mark Juergensmeyer, *Teror atas nama*, (Jagakarsa Jakarta Selatan, Nizam Pers, 2000), h.5

metode gradual, “*step by step*”, yang digunakan oleh Nabi dan Walisongo. Sehingga bagi orang awam, mereka cenderung kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara dan emosional dalam menyampaikan. Tetapi bagi mereka sikap itu adalah sebagai wujud ketegasan, ke-konsistenan dalam berdakwah dan men-junjung misi “*amar ma’aruf nahi munkar*”. Sungguh suatu sikap yang kontraproduktif bagi perkembangan dakwah Islam ke depannya.

Padahal kalau kita lihat sejarah, muka Nabi itu “Tabasum” tersenyum. Diamnya Nabi itu seperti orang yang sedang tersenyum, karena dalam hatinya yang penuh dengan cinta dan kasih. Ahlaknya yang santun dan penuh hikmah dalam setiap ucapannya, membuat para sahabatnya ingin selalu dekat dengannya. Ingin selalu mendengar tausiah-tausiahnya.

NKRI bisa terbentuk berkat perjuangan para pendiri bangsa dahulu awal kemerdekaan RI. Mereka berjuang sepenuh hati, mereka korbankan kehidupan mereka untuk bisa mewujudkan persatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Sehingga sampai sekarang kita kenal banyak pahlawan bangsa yang sudah gugur jauh mendahului kita dalam rangka memperjuangkan cita-cita luhur bangsa. Sayangnya banyak generasi muda yang tidak tahu atau tidak mau tahu dengan perjuangan mereka para leluhur pendiri bangsa. Sehingga timbullah sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang secara diam-diam atau terang-terangan ingin mengganti dasar negara Republik Indonesia yang merupakan landasan terwujudnya persatuan dan kesatuan.

Mereka menyempal dan berafiliasi ke jaringan Islam aliran keras. Mereka yang setuju dengan penggantian Pancasila dan UUD 1945 bergabung dan membuat kelompok eksklusif yang dibungkus dengan agama, sehingga terkesan menarik bagi orang-orang awam yang tidak paham dengan politik. Orang awam ini merasa terakomodasi ide-idenya, sebagai orang yang marginal atau termarginalkan, mereka sama-sama tidak puas dengan pengelolaan negara yang ada sekarang ini. Sehingga mereka berbondong-bondong bergabung dan mendukung ide penggantian ideologi Pancasila yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara rakyat dan pemerintah. Mereka bersatu dan bertekad ingin mengganti ideologi Pancasila dengan sangat halus. Mereka berusaha memiliki sekolah sendiri, bank sendiri, usaha sendiri, jaringan bisnis sendiri dan seterusnya yang semua itu dijalankan oleh kelompok beraliran keras dengan dibungkus agama.⁹⁹

Apabila ada organisasi mengganggu ketertiban umum, memecah belah umat dan NKRI, bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka Pemerintah harus campur tangan. Pemerintah untuk tidak sekadar berwacana dalam menangkal perkembangan radikalisme di Indonesia, namun harus berupa tindakan reaktif cepat dan tepat sasaran. Pemerintah agar menegakan undang-undang terorisme secara maksimal sehingga terorisme tidak berkembang di Indonesia.

⁹⁹ *Ibid.*, hal.6

Komponen yang berperan penting terhadap situasi suatu negara, yaitu agama, ekonomi dan politik. Faham radikalisme kegiatannya dapat dikategorikan sebagai terorisme dimana terdapat suatu ancaman, kekerasan mengambil hak asasi manusia. Untuk itu, bangsa Indonesia harus bekerjasama menentang dan melawan untuk meminimalisir dampak dari faham radikalisme serta mendorong pemerintah untuk mencoba mengurai potret kemunculan faham radikalisme dengan mencoba membatasi potensi-potensi perkembangan faham itu dari luar, yakni dengan cara membentengi NKRI dari paham-paham yang tidak dibenarkan oleh agama. Salah satunya bentengi NKRI dengan pemahaman sesuai ajaran Islam melalui pengajian, pendekatan anak dengan orang tua, dan melalui diskusi-diskusi, dll.

Karna di dalam Islam tidak pernah ada perintah mendirikan negara Islam. Ketika memimpin Madinah, Nabi Muhammad juga tidak mendirikan negara Islam, melainkan membangun masyarakat Islam. Itulah sebabnya istilah “masyarakat madani” muncul dari khazanah Islam, yakni satu masyarakat multiagama dan multi etnik yang hidup secara inklusif dengan penuh peradaban dan demokratis. Masyarakat madinah sering disamakan dengan masyarakat sipil (*civil society*) itu secara harfiah bisa diartikan sebagai “masyarakat Madinah”, sebab kata Madinah selain berarti kota juga berarti “beradab”, yang punya kaitan dengan kata “*tamaddun*” atau peradaban. Inilah dasar adanya demokrasi dalam Islam sebagai bantahan

dari adanya tuduhan “Islam tidak mengenal demokrasi”. Padahal demokrasi itu sudah lahir sejak zaman Nabi Muhamad.¹⁰⁰

Ini merupakan poin penting yang harus terus disosialisasikan. Masyarakat masih banyak yang awam masalah politik luar negeri. Agama yang sudah dipolitisir, tentu sangat berbahaya, karena agama sudah diarahkan pada tujuan pemenuhan kepentingan beberapa gelintir orang saja. Dimana mereka ber-ambisi untuk bisa menjadi penguasa. Penguasa yang bisa mengumbar hawanafsu dengan kekuatan kekuasaannya tersebut. Misalnya kalau kita tonton film pembantaian yang dilakukan oleh pasukan tentara ISIS terhadap rakyat Syiria yang tidak berdosa, yang hanya karena mereka berfaham dan bergama Syiah, sehingga mereka dibunuh dengan keji, tanpa ada rasa kasihan sama sekali. Idiologi seperti ini jelas-jelas telah melanggar HAM dan harus segera dihentikan. Idiologi yang sangat berbahaya, karena ini merupakan sel atau cikal bakal akan adanya perpecahan ditubuh ummat Islam khususnya dan NKRI pada umumnya.

Perbedaan sudah merupakan suatu kenyataan yang harus kita hadapi. Tuhan menciptakan manusia bekelompok-kelompok, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, untuk saling mengenal dan saling menghargai atas perbedaan tersebut. Budaya saling menghormati inilah yang semestinya terus kita pupuk dan terus kita kembangkan bukan justru sebaliknya. Penonjolan pada perbedaan akan mengarah pada perpecahan dan pelemahan terhadap

¹⁰⁰Siti Mahmudah: *Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia* AL-ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012. H. 409

suatu negara. Persatuan yang sudah lama dibangun dengan tenaga, pikiran dan biaya yang begitu besar akan tidak ada artinya selama ideologi radikal pemecah belah umat ini terus dibiarkan berkembang kesepakatan akan bentuk negara kita yang bersistem republik dan presidensial sudah merupakan finish, atau harga mati bagi negara Indonesia, sebagaimana telah dinyatakan oleh menteri agama. “Negara kita ini adalah negara yang menghormati perbedaan keyakinan beragama, sedangkan ISIS berkeinginan membentuk khilafah. Tentunya ini ancaman bagi NKRI.”¹⁰¹

organisasi merupakan faktor penting untuk mencegah terjerumusnya seseorang kedalam gerakan radikal yang ekstrem. Sebaliknya terdapat gejala kuat para mahasiswa yang non aktivis dan kutu buku sangat mudah terkesima sehingga segera dapat mengalami cuci otak dan indoktrinasi pemikiran radikal dan ekstrem. Mereka cenderung naif dan polos karena tidak terbiasa berpikir analitis, kritis, seperti lazimnya dalam kehidupan dunia aktivis. Menggalakkan propaganda anti radikalisme seharusnya menjadi salah satu agenda utama untuk memerangi gerakan radikalisme dari dalam kampus. Peran itu menjadi semakin penting karena organisasi mempunyai banyak jaringan dan pengikut sehingga akan memudahkan propaganda-propaganda kepada kader-kadernya. Jika ini dilaksanakan dengan konsisten, maka pelantapi pasti gerakan radikalisme bisa dicegah

¹⁰¹ <https://m.tempo.co/read/news/2015/02/06/058640488/ormas-ini-dituding-menyimpang-dari-ajaran-islam> diakses 28/06/2019

tanpa harus menggunakan tindakan represif yang akan banyak memakan korban dan biaya.¹⁰²



¹⁰² <http://hmimpofeuii.blogspot.co.id/2011/05/mencegah-radikalisme-dari-kampus.html> diakses 28/06/2019

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid. *Islam, Negara, dan Demokrasi Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur*, Jakarta: ERLANGGA:1999.
- Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam anda Islam kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute. 2006.
- Abuddin Nata, *metodelogi Studi Islam, Cat 5*, (Jakarta; PT. Raja Ganfido Perkasa, 2000).
- AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2005,
- Ahmad bahar, *biografi kiyai politik abdurahman wahid*.
- Ali Masyakur Musa,, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, Jakarta: Erlangga.
- Alfian. Belajar dari Politik Multikulturalisme. *Kewargaan Multi- kultur: Teori Liberal Mengenal Hal-Hak Minoritas*. (Jakarta:LP3SP 1991).
- Al-Quran Terjemah
- Akhmad Taufik,. *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- A.Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara; Pemikiran Politik Ibn Khaldun*, (Jakarta: Gramedia, 1992).
- Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).
- A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: The English Language Book Society and Oxford University Press, 1974),.
- Azra, A. "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme". (Bogor: Brighten Press.2006).
- Badiatul Rozikin, *101 Jejak Tokoh Islam di Indonesia*, Yogyakarta: e- Nusantara. 2009.
- Brebesy Ma'mun Murod, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur Dan Amien Rais Tentang Negara* .Jakarta: Raja Grafindo.1999
- Betty Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),.

- Benjamin Barber, *The Conquest of Politics: Liberal Philosophy in Democratic Times*, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988).
- Burhanuddin Salam, *Etika Sosial (Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Budimansyah, D. dan Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakatan multikultural* (bandung: universitas indonesia 1998).
- Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Mizan, 2006).
- Chepri C, hutabarat. Dkk, *Hakikat politik: gusdur dan catatan yang hilang makna*. (lampung: lampung literature, 2019).
- David Marsh dan Gerry Stoker, *Theory and Methods in Political Science*, (New York: Palgrave macMillan, 2002). Diterjemahkan oleh Helmi Mahadi dan Shohifullah, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2010).
- Deliar Noer, *pemikiran politik di negara barat*, (Bandung : Mizan, 1997).
- Dwi Siswanto, *Konvergensi Antara Liberalisme dan Kolektivisme Sebagai Dasar Etika Politik Di Indonesia*, .
- Faizatun hasanah. MA, *etika gus dur*. ciputat: cinta buku media, 2018. Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Quran*, (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983).
- Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar (Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987).
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet.2, (Jakarta: PT Gramedia, 1988).
- Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001),.
- Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX*, (Jakarta: Kanisius, 1998),.
- Greg Barton, *Biografy Gus Dur: The Authorized Biograpy of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta:LkiS. 2002.

Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, (Jakarta: Publicita, 1978), Lihat, Suparman Syukur, *Etika Religius*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),.

Hatta, Mohammad. 2014. "*Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan Otonomi*". (Bantul: Kreasi Wacana 2014).

Hidup Muslim Terkemuka dari Zaman Klasik hingga Kontemporer. Jakarta: Mizan Media Utama:., 2015.

<http://www.tunas63.wordpress.com/2009/12.../biografi-gus-dur-dan-keluarga>.

<https://m.tempo.co/read/news/2015/02/06/058640488/ormas-ini-dituding-menyimpang-dari-ajaran-islam>.

<http://hmimpofeuii.blogspot.co.id/2011/05/mencegah-radikalisme-dari-kampus.html>.

<http://filsafataddict.blogspot.com/2014/07/definisi-pemikiran.html>.

<http://panah-bambu.blogspot.com/2012/11/etika-politik.html>.

<http://wwwmohammadnasruddin.blogspot.com/2011/03/resume-etika-politik.html>.

<http://budisma1.blogspot.com/2011/08/budaya-politik-di-indonesia.html>.

Inu kencana Syafi'i, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Jakob Oetama dan Yenny Zannuba Wahid (ed), *Damai Bersama Gus dur*, (Jakarta: PT Kompas Nusatara, 2010).

John L. Esposito, *Ensikopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid 2, (Bandung: Mizan, 2002).

Joko Widodo, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011),.

Joseph Losco-Leonard Williams, *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).

K.H. Husein Muhammad, *Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur*. Yogyakarta: LkiS, 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

- Kaclan, M.S Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Paradigma, Yogyakarta 2005.
- Kahin, George. *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1952).
- Katimin, *Mozaik Pemikiran Islam Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010).
- K. Bretens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994),.
- Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis Angkasa*, Bandung, 2002,.
- Lexy L Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya*, Bandung, Cet. XIV, 2001.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*,Cet. Ke 7, Bumi Aksara, Jakarta 2004.
- Mahfud,C. *Pendidikan Multikultural*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009).
- Mark Juergensmeyer,*Teror atas nama*, (Jagakarsa Jakarta Selatan,Nizam Pers, 2000).
- Muhammad Azhar, *Etika Politik Muhammed Arkoun*, Jurnal Disertasi, vol. 10 no. 1, Juni 2012.
- Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani: Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat- ayat Kekuasaan*, (Medan: IAIN Press, 2010).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, .
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004,.
- M. Bukhori Pahrroji, *Membebaskan Agama Dari Negara; Pemikiran Abdurrahman Wahid Dan Ali Abd Ar-Raziq*.Bantul: Pondok Sanusi. 2003.
- Muhammad AS Hikam. *Gus Dur Ku Gus Dur Anda Gus Dur Kita Kenangan Wawancara Imajiner, dan Guyonan Gusdarian*. Bandung : Penerbit Yrama widya. 2013.

- Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LkiS. 2010.
- Muhammad A.S Hikam. *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman*. Jakarta: Kompas 2000.
- Muhammad said Etika masarakat indonesia (jakarta : paramita), 1960, .
- Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 1998).
- Rany Kautur, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, Taruna Grafika, Bandung, 2000.
- Rahmat Jatnika, *Sistem Etika Islam, Akhlak Mulia*, (Surabaya: Pustaka Islam, 1985),.
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1999).
- Runi Hariantati, *Etika Politik Dalam Negara Demokrasi*, Jurnal Demokrasi, Vol. II No. 1 Th. 2003.
- Saifullah Ma"sum (ed.), *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, Bandung: Mizan1926, bahan mengenai Kiai Hasyim Asy"ari.
- Siti Mahmudah: *Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia* AL-'ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012.
- Tilaar, H.A.R. *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta.2007).
- Pitut dan drs. A. Zainoel Ihsan. *Tjokroaminoto, O. S., Abdoel Moeis, dan R. Hasan Djajadiningrat. Nasionalisme, Sistem Pemerintahan dan Mandiri*, (Jakarta: Jaya Sakti, 1981).
- Yahya A. Muhaimin, *Etika Pembangunan Politik*, dalam Nourouzzaman Shiddiqi dkk, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).